



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408879/2024**



DS:4395-3573-1697-9385

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 05

Tanggal : 12 Agustus 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Provinsi : (22) BALI
- Kode>Nama Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
- Sebesar : Rp. 1.177.820.000 (SATU MILIAR SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.177.820.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 1.177.820.000

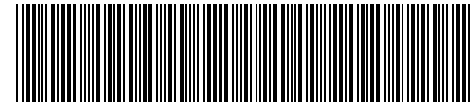
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024

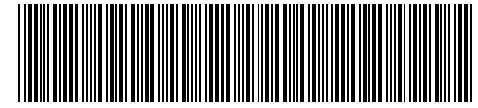


DS:4395-3573-1697-9385

Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	136.068.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	136.068.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.041.752.000
BF.4841	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	1.041.752.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



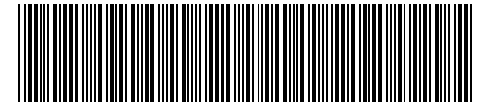
DS:4395-3573-1697-9385

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			136.068.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			136.068.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan			
		2. 02	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	22.720.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	22.720.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	113.348.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	113.348.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.041.752.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			1.041.752.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah			
		2. 01	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi			
		3. 01	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	88.651.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	5,00	Lembaga	88.651.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4395-3573-1697-9385

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		17,00	Kelompok Masyarakat	163.043.000
Rincian Output		:	01	BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	32.043.000
		:	02	BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	131.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan Lembaga	65.967.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	6,00	Lembaga	65.967.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		6,00	Lembaga, Unit Kerja	68.051.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	6,00	Lembaga	68.051.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		66,00	Orang	528.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	66,00	Orang	528.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		12,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	128.040.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	12,00	Kegiatan	128.040.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

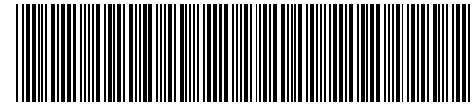
ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4395-3573-1697-9385

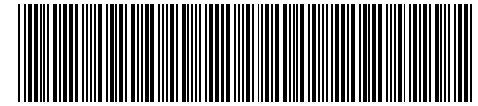
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.177.820.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.177.820.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



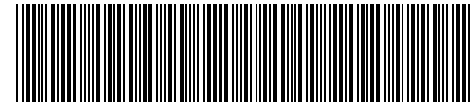
DS:4395-3573-1697-9385

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408879	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	-	1.177.820	-	-	-	1.177.820		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	136.068	-	-	-	136.068		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	136.068	-	-	-	136.068		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	22.720	-	-	-	22.720	22 . 51	
01	RM	-	22.720	-	-	-	22.720	037	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	113.348	-	-	-	113.348	22 . 51	
01	RM	-	113.348	-	-	-	113.348	037	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.041.752	-	-	-	1.041.752		
4841	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.041.752	-	-	-	1.041.752		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	88.651	-	-	-	88.651	22 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



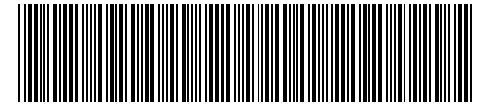
DS:4395-3573-1697-9385

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	88.651	-	-	-	88.651	037	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	163.043	-	-	-	163.043	22 . 51	
01 RM		-	163.043	-	-	-	163.043	037	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	65.967	-	-	-	65.967	22 . 51	
01 RM		-	65.967	-	-	-	65.967	037	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	68.051	-	-	-	68.051	22 . 51	
01 RM		-	68.051	-	-	-	68.051	037	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	528.000	-	-	-	528.000	22 . 51	
01 RM		-	528.000	-	-	-	528.000	037	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4395-3573-1697-9385

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
Kewenangan : (KD)

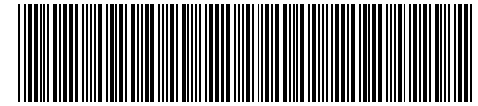
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	128.040	-	-	-	128.040	22 . 51	
01 RM		-	128.040	-	-	-	128.040	037	
JUMLAH		-	1.177.820	-	-	-	1.177.820		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4395-3573-1697-9385

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

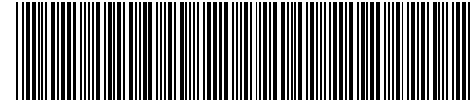
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408879	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	69.633	156.728	109.325	162.185	157.507	118.038	99.885	104.586	42.300	43.800	113.833	1.177.820
		BELANJA BARANG	0	69.633	156.728	109.325	162.185	157.507	118.038	99.885	104.586	42.300	43.800	113.833	1.177.820
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	49.800	10.700	1.600	0	13.280	34.695	1.280	24.713	0	0	0	136.068
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	49.800	10.700	1.600	0	13.280	34.695	1.280	24.713	0	0	0	136.068
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	19.833	146.028	107.725	162.185	144.227	83.343	98.605	79.873	42.300	43.800	113.833	1.041.752
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	19.833	146.028	107.725	162.185	144.227	83.343	98.605	79.873	42.300	43.800	113.833	1.041.752

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4395-3573-1697-9385

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408879] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4395-3573-1697-9385

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408879] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001